

## **Transkrip Wawancara - Pak Aris (FMPMA)**

Narasumber: Pak Aris (Anggota Forum Masyarakat Peduli Mata Air - FMPMA & Warga Lokal)

Pewawancara: Peneliti

### **Bagian 1: Awal Mula Konflik dan Kegelisahan Warga**

Pewawancara:

Bisa diceritakan kembali, Pak, bagaimana awal mula warga mengetahui adanya rencana pembangunan Hotel The Rayja dan apa yang menjadi kekhawatiran awal?

Narasumber:

Konflik ini dimulai sekitar akhir tahun 2010 atau awal 2011. Saat itu, kami sebagai masyarakat mendengar informasi akan adanya pembangunan hotel di wilayah kami. Awalnya, kami belum tahu lokasi persisnya dan menganggapnya seperti pembangunan hotel pada umumnya. Namun, sekitar satu atau dua bulan kemudian, kami mengetahui bahwa lokasinya berada tepat di atas sumber mata air.

Dari situlah muncul kegelisahan, terutama dari para pengguna air atau anggota Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM). Kekhawatiran pertama kami saat itu sebenarnya masih sangat awam, yaitu hanya takut akan adanya pencemaran. Namun, kekhawatiran itu semakin besar ketika kami mengetahui detail rencananya. Hotel itu akan dibangun setinggi 10 atau 12 lantai dan menggunakan *basement*, yang artinya akan ada pengerukan tanah yang sangat dalam di dekat sumber.

### **Bagian 2: Proses Advokasi dan Temuan Maladministrasi**

Pewawancara:

Setelah mengetahui rencana detail tersebut, langkah apa yang diambil warga dan apa temuan krusial yang menjadi dasar perlawanan?

Narasumber:

Kami berkeluh kesah ke pihak desa, karena mereka yang punya otoritas. Namun, pihak desa saat itu mengatakan bahwa pembangunan itu tidak masalah karena lokasinya dianggap jauh. Kegelisahan memuncak ketika sebuah *dozer* benar-benar beraktivitas dan mengeruk permukaan tanah di lokasi tersebut sampai dalam. Akhirnya kami bermusyawarah dan menyampaikan protes resmi ke desa untuk menanyakan proses perizinannya.

Dalam proses mencari informasi, kami menemukan fakta bahwa proses perizinan ini cacat administrasi. Salah satu bukti terkuat adalah izin pembangunannya keluar lebih dulu, sementara dokumen analisis dampak lingkungan (UKL-UPL) belum ada. Selain itu, proses sosialisasi yang dilakukan oleh pengembang juga hanya formalitas belaka. Mereka tidak

mengundang warga yang paling terdampak seperti dari dusun Bumiaji dan Sidomulyo. Temuan-temuan inilah yang meyakinkan kami bahwa ada yang tidak beres dan menguatkan perjuangan kami untuk melakukan penolakan.

### **Bagian 3: Pembentukan FMPMA dan Solidaritas Warga**

Pewawancara:

Bagaimana Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) terbentuk dan bagaimana respon masyarakat secara umum saat itu?

Narasumber:

FMPMA terbentuk pada tahun 2011, berawal dari kegelisahan kami semua. Tujuan utamanya sangat praktis: kami sadar bahwa untuk melakukan protes atau mengirim surat resmi ke pemerintah, kami tidak bisa bergerak atas nama perorangan. Harus ada satu naungan atau lembaga agar suara kami didengar dengan serius.

Terkait respon masyarakat, memang tidak semua langsung serentak menolak, karena tingkat pemahaman setiap orang berbeda. Namun, para tokoh masyarakat dan pengurus HIPPAM yang lebih paham soal kondisi air sudah khawatir sejak awal. Pergerakan ini kemudian meluas dari mulut ke mulut (*getok tular*), di mana warga yang lebih paham menjelaskan kepada yang lain menggunakan bahasa mereka sehari-hari.

### **Bagian 4: Nilai Penting dan Sakralitas Umbul Gemulo**

Pewawancara:

Selain untuk kebutuhan air minum, apa nilai lain dari Umbul Gemulo bagi masyarakat sehingga harus dipertahankan mati-matian?

Narasumber:

Sumber ini adalah satu-satunya yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat Dusun Cangar dan sekitarnya. Jika kami harus mengambil air dari sumber lain, biayanya akan sangat besar. Selain itu, air dari Umbul Gemulo ini juga mengairi lahan pertanian di banyak wilayah, termasuk Bumiaji, Sidomulyo, dan daerah lainnya. Kami juga merasakan sendiri bagaimana debit airnya terus menurun dari tahun ke tahun. Dulu alirannya besar, sekarang untuk pengairan saja harus bergantian.

Secara budaya, masyarakat juga menganggap sumber ini sebagai tempat yang "wingit" atau sakral. Kami percaya bahwa alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan para perusak. Jadi, mempertahankan Umbul Gemulo ini menjadi prioritas utama masyarakat, bukan hanya soal air, tapi juga soal keberlanjutan hidup dan budaya.

### **Bagian 5: Misi Murni Pergerakan dan Perkembangan Selanjutnya**

Pewawancara:

Seringkali gerakan seperti ini dianggap ditunggangi kepentingan politik. Bagaimana FMPMA menanggapi?

Narasumber:

Kami murni berjuang untuk menyelamatkan sumber mata air. Tidak ada kepentingan politik sama sekali. Sebagai contoh, saat dulu ada kasus ijazah palsu Walikota Edi Rumpoko, kami tidak pernah menyinggung atau terlibat sedikit pun. Urusan kami dengan Pemkot Batu saat itu hanya satu: tentang Umbul Gemulo. Kami hanya minta agar lahan itu diselamatkan. Prinsip ini kami pegang sampai sekarang. Siapapun pemimpinnya, jika kebijakannya mengancam kelestarian sumber, kami akan mengingatkan.

Pewawancara:

Bagaimana perkembangan pergerakan ini, terutama terkait regenerasi dan menghadapi ancaman baru seperti SPPG?

Narasumber:

Perjuangan ini terus berjalan dan beregenerasi. Setelah FMPMA, muncul kelompok-kelompok pemuda seperti Nawakalam yang lebih fokus pada kampanye dan edukasi untuk generasi muda. Terkait ancaman baru seperti rencana pembangunan SPPG, kami melihat ada perubahan sikap dari pemerintah desa yang sekarang. Mereka lebih terbuka dan mau memfasilitasi musyawarah dengan warga, tidak seperti dulu yang cenderung cuek. Ini sebuah kemajuan, meskipun perjuangan untuk menjaga sumber mata air ini belum akan berakhir.

### **Transkrip Wawancara - Mas Indra (Aktivis & WALHI Jatim)**

Narasumber: Mas Indra (Manajer Advokasi WALHI Jatim / Aktivis Nawakalam)

Pewawancara: Peneliti

#### **Bagian 1: Ikatan Personal, Budaya, dan Awal Mula Keterlibatan**

Pewawancara:

Bisa Anda ceritakan hubungan personal Anda dengan Sumber Gemulo dan bagaimana budaya lokal menjadi bagian dari pergerakan?

Narasumber:

Sumber Gemulo bagi saya adalah ruang komunal dan tempat bermain sejak kecil, sebelum era gawai mendominasi. Itu adalah titik temu sosial. Secara budaya, ada tradisi "barian" atau selamatan sumber yang sangat sakral, di mana masyarakat meyakini adanya "bah" atau penunggu yang harus dihormati. Namun, dulu pelaksanaannya cenderung terbatas untuk kalangan sesepuh saja.

Ketika konflik muncul, kami sengaja menghidupkan kembali tradisi itu melalui "Festival Mata Air". Kami sengaja memakai nama 'festival' untuk mendobrak kesan elitis dan agar bisa merangkul semua kalangan, terutama pemuda. Indikator keberhasilannya adalah kini warga sudah punya inisiatif sendiri untuk melaksanakan barian tanpa harus digerakkan. Artinya ikatan rasa antara warga dan sumbernya sudah terjalin kembali.

Pewawancara:

Bagaimana Anda secara pribadi bisa begitu terlibat dalam gerakan ini?

Narasumber:

Saya berasal dari keluarga buruh tani biasa. Awalnya, ketika saya punya pendapat, di beberapa lingkaran sosial saya merasa tidak didengar karena kelas sosial. Namun, dalam konteks perjuangan lingkungan ini, diskusinya lebih terbuka dan saya merasa diterima. Karena sejak kecil sering bermain di sana, rasa memiliki itu sudah ada. Semakin saya tahu ancumannya, semakin besar kegelisahan saya. Saya juga banyak dibantu oleh Pak Purnawan (Pupung) dari UWG, beliau yang membantu saya mencari beasiswa untuk bisa kuliah. Jadi, keterlibatan ini adalah gabungan antara ikatan personal dan proses belajar bersama kawan-kawan seperjuangan.

## **Bagian 2: Analisis Akar Masalah dan Pola Konflik**

Pewawancara:

Dari perspektif Anda sebagai aktivis dan bagian dari WALHI, apa sebenarnya akar masalah dari konflik lingkungan yang terus berulang di Batu?

Narasumber:

Akar masalahnya, menurut saya, terletak pada

**moralitas birokrasi.** Sistem dan aturannya mungkin sudah ada, tapi aparat yang menjalankannya bermasalah, baik karena tidak kompeten atau sengaja bermain. Dalam kasus Hotel The Raydja, jika Pemkot Batu saat itu paham dan berani menegakkan aturan tata ruang, izin tidak akan pernah keluar. Izin itu bisa terbit karena pengembang menggunakan dalih membangun *cottage*, bukan hotel, sehingga hanya memerlukan UKL-UPL, bukan AMDAL. Mereka mengabaikan faktor krusial yaitu lokasi yang berada di kawasan lindung.

Pola yang sama terulang pada kasus SPPG (Dapur MBG). Logikanya, tidak mungkin pemerintah pusat bisa menunjuk lokasi spesifik itu tanpa ada usulan dari pemerintah daerah. Kenapa Pemkot menyodorkan lahan itu? Apakah mereka tidak tahu, atau sengaja menutup mata dan tidak mau belajar dari kasus sebelumnya?. Ada dugaan, membiarkan satu proyek seperti ini bisa menjadi "pintu pembuka" untuk melegitimasi pembangunan lain di sekitarnya di kemudian hari.

## **Bagian 3: Peran WALHI dan Strategi Pergerakan**

Pewawancara:

Bagaimana sebetulnya WALHI bisa terlibat dalam kasus Gemulo?

Narasumber:

Awalnya, teman-teman FMPMA mengirimkan laporan pengaduan ke Malang Corruption Watch (MCW). Kemudian MCW mengajak WALHI untuk ikut mendampingi. Dari situlah WALHI masuk dan membangun ikatan hingga sekarang. Peran WALHI berbeda dari NGO lain; roh kami adalah pengorganisasian massa di tingkat akar rumput (*grassroot*) dan advokasi konflik, bukan sekadar kampanye.

Pewawancara:

Lalu, bagaimana strategi WALHI dalam mengawal kasus ini?

Narasumber:

Peran kami bukanlah sebagai provokator. Inisiatif perlawanan datang murni dari warga karena sumber penghidupan mereka terancam. WALHI lebih berfungsi sebagai "pemantik" dan pengawal. Kami membantu memperkuat argumentasi warga dengan data dan analisis kebijakan. Strategi kami berjalan di tiga level:

1. **Level Kebijakan:** Mendorong lahirnya Peraturan Desa/Daerah yang melindungi sumber mata air secara hukum.
2. **Level Tapak (Lokasi):** Memperkuat ikatan budaya warga dengan sumbernya dan mendorong agar kawasan tersebut difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
3. **Level Ekosistem:** Advokasi yang lebih luas untuk melindungi seluruh *catchment area* (daerah tangkapan air) di kawasan hutan Arjuno-Welirang, karena sumber air tidak akan selamat jika hulu nya rusak.

#### **Bagian 4: Taktik Perlawanan, Intimidasi, dan Kemenangan Hukum**

Pewawancara:

Bisa ceritakan lebih detail bentuk perlawanan dan tekanan yang dialami warga?

Narasumber:

Bentuk perlawanan sangat beragam. Ada aksi-aksi kreatif, seperti "Festival Mata Air" tadi. Ada juga taktik psikologis; misalnya saat audiensi dengan pejabat, kami tidak akan menyentuh makanan atau minuman yang disajikan sebagai bentuk sikap bahwa kami datang untuk berjuang, bukan untuk basa-basi. Tapi setelah audiensi selesai, kami akan makan-makan bersama untuk menjaga semangat dan nafas perjuangan tetap panjang.

Intimidasi yang kami alami juga berat. Mulai dari didatangi intel ke rumah, hingga ormas FKPPi masuk ke kampung untuk mencari aktivis. Puncaknya adalah kriminalisasi, di mana

warga dilaporkan atas tuduhan mencuri tiga buah batu, sepotong bambu, dan merusak satu sak semen. Aneh, tapi itu cara mereka menekan. Namun, dari perlawanan hukum inilah lahir kemenangan terbesar kami. Kasus Gemulo menjadi salah satu referensi yurisprudensi penting bagi Mahkamah Agung dan Kementerian LHK dalam menyusun peraturan Anti-SLAPP (perlindungan bagi pejuang lingkungan).

## **Bagian 5: Refleksi, Tantangan Terbesar, dan Harapan untuk Masa Depan**

Pewawancara:

Terakhir, apa refleksi dan tantangan terbesar bagi keberlanjutan gerakan ini?

Narasumber:

Tantangan terbesar dalam advokasi seperti ini adalah membangun "imajinasi kerusakan". Sulit meyakinkan orang tentang ancaman yang dampaknya belum terasa langsung. Tapi tantangan yang paling membuat saya sedih adalah soal **regenerasi**. Saya rindu ada ruang diskusi kritis di kalangan anak-anak muda Batu. Saat ini, mereka cenderung terlena dengan citra Batu yang "adem" dan sejuk di permukaan, tapi abai terhadap konflik ekologis yang sebenarnya terjadi.

Saya khawatir, jika tidak ada transfer pengetahuan dan ikatan emosional dari generasi kami ke generasi berikutnya, siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini 10 atau 20 tahun lagi saat ancaman baru yang mungkin lebih kompleks datang? Keberlanjutan gerakan ini sepenuhnya bergantung pada itu.

Kenapa WALHI dulu bisa mengadvokasi Gemulo? Ya dulu orang - orang (FMPMA) mengirim surat pengaduan kemana saja yang kemudian dibawa secara khusus (difasilitasi) oleh teman - teman dari MCW, dan dari situlah WALHI diajak serta masuk (terlibat) sampai sekarang membangun ikatan kuat bersama FMPMA.

## **Transkrip Wawancara - Suhermawan (Kepala Desa Bulukerto)**

Narasumber: Suhermawan (Kepala Desa Bulukerto)

Pewawancara: Peneliti

Bagian 1: Refleksi dari Dua Sisi: Aktivis dan Pemimpin Desa

Pewawancara:

Terima kasih sekali atas waktunya, Pak Kades. Saya sangat ingin belajar dari Bapak karena posisi Bapak yang istimewa: dulu berada di garda depan perjuangan bersama masyarakat, dan kini mengemban amanah sebagai pemimpin desa. Bisa Bapak ceritakan, bagaimana rasanya melihat perjuangan itu dari dua sisi yang berbeda?

Narasumber:

Bagi saya, terlibat dalam proses perjuangan, dimanapun tempatnya, adalah sebuah panggilan jiwa (moral call). Pertanyaannya adalah, di mana ruang kita untuk berjuang? Dulu saya berjuang dari luar, dan sekarang saya memilih berjuang dari dalam sistem, yaitu masuk ke pemerintahan. Tentu rasanya berbeda. Dari dalam, saya bisa sedikit demi sedikit menanamkan kesadaran kepada warga, misalnya soal menjaga alam dengan memilah sampah, dan ini menjadi harga mati bagi saya untuk keberlanjutan hidup hingga tujuh generasi ke depan.

Tantangannya adalah, ketika kita masuk ke dalam sistem, ada risiko kita yang terbawa arus dan menjadi "aktivis yang murtad". Godaan Nya banyak. Menjadi seorang pejabat publik itu harusnya "sorrow" (sedih/prihatin), bukan "happy" (bahagia), karena bebannya berat. Saya harus menjaga diri agar tidak terjebak *post-power syndrome* dan tetap menjadi manusia, bukan sekadar pejabat.

Bagian 2: Memori Perjuangan – Akar Perlawanan dan Solidaritas Warga

Pewawancara:

Mengingat kembali ke masa-masa awal perjuangan dulu, apa yang menjadi kegelisahan paling mendasar yang mendorong warga untuk bergerak melawan pembangunan Hotel The Rayja?

Narasumber:

Pemicu utamanya adalah rasa terancam (threat). Sumber mata air mereka, yang menjadi sumber kehidupan, terancam. Ini yang secara organik menggerakkan mereka untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan. Sumber Gemulo ini sangat vital; dipakai untuk air minum oleh hampir seluruh warga Desa Bumiaji, 40-60% warga Desa Sidomulyo, dan satu dusun di Desa Bulukerto. Selain itu, airnya juga dipakai untuk irigasi hingga ke PDAM. Jadi, ancaman itu dirasakan secara kolektif.

Pewawancara:

Bagaimana strategi perjuangan dirancang saat itu dan bagaimana solidaritas warga terbangun?

Narasumber:

Pergerakan itu dimulai dari satu atau dua orang penggerak yang punya kesamaan visi. Kemudian menyebar melalui rembuk warga atau konsolidasi, hingga akhirnya dilakukan perluasan dengan cara door-to-door atau canvassing untuk menyamakan persepsi. Seperti yang diceritakan Pak Aris, mereka kemudian membentuk Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) sebagai wadah resmi untuk mengirimkan surat dan menyampaikan aspirasi secara formal. Solidaritasnya sangat kuat, puncaknya saat demonstrasi besar di bulan Januari 2013, di mana ribuan orang turun ke jalan.

### Bagian 3: Perspektif dari Dalam Pemerintahan: Strategi dan Kebijakan Saat Ini

Pewawancara:

Sekarang, dengan posisi Bapak sebagai Kepala Desa, bagaimana cara Bapak menampung aspirasi warga, terutama dalam menghadapi isu baru seperti rencana pembangunan SPPG?

Narasumber:

Saya lebih memilih untuk turun langsung dan mendengarkan. Saya tidak suka hal-hal yang terlalu prosedural. Daripada saya didatangi warga yang sudah marah, lebih baik saya yang mendatangi mereka lebih dulu saat konsolidasi. Saat kasus SPPG ini muncul, saya langsung turun, ngobrol dengan warga, supaya friksi sosial tidak terjadi seperti tahun 2013. Setelah mendengar aspirasi mereka, saya mengambil sikap dan bersurat resmi kepada Walikota untuk menyatakan keberatan, meskipun saya tahu risikonya saya akan dianggap "tidak bisa diatur" atau "cari panggung".

Tugas pemerintah itu satu: memberes masalah, bukan memperumit. Saya selalu membuka ruang partisipasi. Kantor desa harus menjadi rumah *restorative justice*. Bahkan saya berencana membuat program konsultasi hukum gratis setiap hari Sabtu, di luar jam kerja, agar warga punya ruang untuk mengadu.

Pewawancara:

Belajar dari pengalaman dulu, kebijakan konkret apa yang sedang Bapak gagas untuk melindungi lingkungan?

Narasumber:

Saat ini kami sedang menyusun Peraturan Desa (Perdes) khusus tentang perlindungan sumber mata air. Ini adalah inisiatif kami, di luar Perdes wajib seperti APBDes. Selain itu, kami juga sedang menggodok Perdes tentang perlindungan anak dan pengelolaan sampah. Ini adalah cara saya berjuang dari dalam. Jika dulu dari luar kita menuntut, sekarang dari dalam kita yang membuat aturannya untuk memastikan kelestarian itu terjaga secara hukum di tingkat desa.

### Bagian 4: Menatap Masa Depan – Warisan dan Harapan

Pewawancara:

Menurut Bapak, apa warisan atau hasil paling berharga dari perjuangan Umbul Gemulo bagi masyarakat hingga hari ini?

Narasumber:

Hal yang paling berharga dan mahal adalah terbukanya kanal diskusi dan proses pembelajaran bersama. Perjuangan itu secara tidak sadar meningkatkan kesadaran warga, membuka ruang dialektika, dan terjadi pertukaran ilmu serta ide. Ada *challenging of mind*. Tanpa adanya perjuangan itu, mungkin masyarakat akan stagnan dan hanya mengikuti

sistem. Solidaritas yang terbangun saat itu menjadi modal sosial yang sangat kuat hingga hari ini.

Pewawancara:

Terakhir, Pak Kades. Pelajaran apa yang paling penting dari kisah perjuangan Umbul Gemulo yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda?

Narasumber:

Pesan saya sederhana, sesuai pepatah lama: "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung". Maka, kita harus menjaga alam dan bumi kita. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk lebih sabar, lebih terbuka, dan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Dulu, saat melihat dari luar, kita merasa semua terlihat baik-baik saja. Tapi setelah masuk ke dalam, kita baru tahu ternyata banyak sekali masalah yang tidak terlihat, seperti warga yang terjerat pinjol atau rentenir.

Maka dari itu, pelajaran paling berharga adalah pentingnya menjadi manusia yang utuh, yang mau turun, mendengarkan, dan merangkul. Kita harus terus belajar dan tidak alergi terhadap kritik, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama.

### **Transkrip Wawancara - Petrus Rizki (Jurnalis Mongabay)**

Narasumber: Petrus Rizki (Jurnalis Mongabay Indonesia)

Pewawancara: Peneliti

#### **Bagian 1: Latar Belakang dan Alasan Peliputan Kasus Umbul Gemulo**

Pewawancara:

Bapak sudah lama berkecimpung di dunia jurnalisme. Bisa ceritakan sedikit latar belakang Anda dan mengapa Mongabay memutuskan untuk meliput kasus Umbul Gemulo?

Narasumber:

Saya sudah menjadi jurnalis sejak 2004, pernah di Radio Sonora, KBR, dan VOA Indonesia. Saya bergabung dengan Mongabay pada 2013, namun kasus Umbul Gemulo ini sudah diliput lebih dulu oleh rekan saya. Saya hanya melanjutkan. Alasan Mongabay sangat tertarik adalah karena ini sesuai dengan fokus utama kami. Mongabay memiliki konsen khusus untuk menulis berita seputar isu lingkungan, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Dalam kasus Umbul Gemulo, ada aksi dan reaksi masyarakat yang menolak pembangunan Hotel The Rayja karena dianggap akan berdampak pada berkurangnya sumber mata air. Sumber mata air adalah bagian vital dari kehidupan, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga

untuk seluruh ekosistem di sekitarnya. Jika sumber itu terganggu, maka kehidupan makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Inilah yang menjadi fokus utama kami.

## **Bagian 2: Strategi Pembingkai (Framing) Isu Lingkungan**

Pewawancara:

Dalam meliput kasus seperti ini, framing atau pembingkai seperti apa yang Mongabay gunakan? Apakah fokus pada kerusakan ekologis, perjuangan sosial, atau aspek hukumnya?

Narasumber:

Kami menggunakan ketiganya. **Pertama, kerusakan ekologis.** Bahkan jika tidak ada masyarakat yang menyuarakannya, jika kami melihat ada kerusakan ekologis, kami akan tetap menuliskannya.

**Kedua, aspek hukum.** Jika ada pelanggaran, misalnya alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi, itu pasti akan menjadi perhatian kami.

**Ketiga, perjuangan masyarakat.** Ketika ada masyarakat yang berteriak atau menyampaikan keluhannya, bagi Mongabay, wajib hukumnya untuk terlibat membantu menyuarakan suara mereka yang tidak bisa bersuara.

## **Bagian 3: Prinsip Keberpihakan dan Objektivitas dalam Jurnalisme**

Pewawancara:

Media sering diminta netral. Bagaimana Mongabay memposisikan diri di tengah konflik antara kepentingan ekonomi dan hak atas ruang hidup warga?

Narasumber:

Kalau bicara media itu netral, tidak ada media yang netral. Media itu selalu berpihak. Keberpihakan kami adalah pada lingkungan. Ketika lingkungan itu rusak, kami tidak mungkin membenarkannya. Meskipun begitu, kami tidak akan mengesampingkan pihak-pihak yang berlawanan. Dalam jurnalisme, ada prinsip

*cover both side*. Pihak pemerintah atau swasta tetap kami berikan ruang untuk memberikan keterangan atau hak jawabnya.

Namun, keberpihakan media itu ditunjukkan dengan memberikan porsi lebih pada mereka yang tidak bisa bersuara. Kami hadirkan semua fakta, data, dan pernyataan dari semua pihak, lalu biarkan masyarakat yang menilai sendiri. Tapi yang kami utamakan adalah apa yang menjadi kepentingan publik, yaitu kebutuhan akan ruang hidup yang sehat.

## **Bagian 4: Tantangan dalam Proses Peliputan dan Akses Informasi**

Pewawancara:

Dalam meliput isu sensitif, apakah Bapak pernah mengalami kesulitan mengakses informasi dari pihak pemerintah atau perusahaan?

Narasumber:

Biasanya, jika isunya sensitif, pihak yang merasa tersudut akan jarang mau bicara, atau walaupun bicara keterangannya sangat singkat. Kebanyakan pejabat memilih tidak berkomentar karena khawatir menjadi bumerang. Untuk mengatasinya, kami mengandalkan data dari sumber terbuka (*open source*) seperti website, meminta draft dokumen seperti RPJMD dari anggota dewan, atau mendapat informasi dari narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya.

Informasi tersebut kemudian kami gunakan untuk melakukan konfirmasi. Jika saat dikonfirmasi dengan data yang kami miliki seorang pejabat menghindar atau tidak mau bereaksi, bagi kami itu sudah menjadi bagian dari jawaban. Biar publik yang menilai sendiri apa arti dari sikap tersebut.

### **Bagian 5: Perbedaan Jurnalisme dan Aktivisme**

Pewawancara:

Di mana batas antara jurnalisme dan aktivisme dalam mengawal isu seperti ini?

Narasumber:

Aktivisme itu terlibat langsung. Mereka merancang strategi, bergerak, dan menjadi bagian dari dalam sebuah isu untuk memenangkannya. 16 Jurnalisme punya batasan, kami tidak bisa terlalu masuk ke dalam. Jika terlalu dalam, kami khawatir tidak bisa lagi melihat persoalan secara lebih luas dan menjadi terlalu bias.

Peran jurnalis lebih sebagai mediator. Kami menyajikan informasi, memotret masalah dari berbagai sisi, dan bahkan bisa menawarkan berbagai perspektif solusi yang kami dapat dari sumber lain. Misalnya, kami bisa bertanya ke pemerintah, "Ada pendapat seperti ini, bagaimana menurut Bapak?". Lalu ke warga, "Apakah pernah mencoba cara ini?". Kami memberikan masukan, tapi tidak menyuruh atau mendikte gerakan mereka. Kami tidak boleh menjadi media yang "mengompori" atau memprovokasi konflik fisik.

### **Bagian 6: Refleksi dan Tantangan Jurnalisme Lingkungan di Indonesia**

Pewawancara:

Terakhir, Pak. Refleksi apa yang bisa diambil dari pengalaman Anda mengenai tantangan jurnalisme lingkungan di Indonesia?

Narasumber:

Pertama, meliput isu lingkungan itu butuh nafas panjang. Ini bukan lari cepat, tapi maraton. Kita tidak bisa hanya menulis satu kali lalu selesai. Perlu ada liputan berseri dari beragam sudut pandang agar masyarakat benar-benar paham dan isu tersebut tidak hilang.

Kedua, baik gerakan masyarakat maupun media harus terus berinovasi. Publik bisa bosan jika disajikan hal yang monoton, misalnya aksi demo dengan isu yang sama terus-menerus. Perlu ada kreativitas dalam menyuarakan protes. Misalnya, Ecoton sangat kreatif, mereka bisa bicara soal mikroplastik melalui kampanye hormon ikan, kualitas air minum, hingga seni instalasi. Kreativitas ini membuat sebuah isu tetap menarik dan pesannya tersampaikan dengan cara-cara baru yang lebih efektif.

### **Transkrip Wawancara - Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu**

Judul: Perspektif Pembangunan: Visi, Strategi, dan Dinamika Pariwisata Kota Batu

Narasumber: Staf Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu

Pewawancara: Peneliti

#### **Bagian 1: Visi dan Prioritas Utama Pariwisata Kota Batu**

Pewawancara:

Apa yang menjadi visi dan target utama Dinas Pariwisata untuk pembangunan Kota Batu ke depan, terutama yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD?

Narasumber:

Visi utama kami, sesuai dengan arahan dalam RPJMD dan RPJPD, adalah mengukuhkan posisi Kota Batu sebagai destinasi pariwisata terkemuka di tingkat nasional, bahkan internasional. Fokus kami jelas: peningkatan kunjungan wisatawan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Setiap program yang kami rancang, muaranya adalah untuk mencapai dua target tersebut. Pembangunan infrastruktur penunjang, atraksi baru, dan promosi yang masif menjadi prioritas untuk menjaga daya saing dan pertumbuhan ekonomi kota.

#### **Bagian 2: Konsep "Pariwisata Berkelanjutan" dalam Praktik**

Pewawancara:

Pemerintah sering menggunakan istilah "pariwisata berkelanjutan". Bisa dijelaskan bagaimana Disparta menerjemahkan konsep ini ke dalam program-program nyata?

Narasumber (Jawaban diperkaya untuk analisis Polanyi & Habermas):

Bagi kami, pariwisata berkelanjutan itu memiliki tiga pilar: ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Wujud konkretnya adalah program unggulan kami, yaitu pengembangan Desa Wisata. Melalui program ini, kami tidak hanya menciptakan atraksi baru, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Kami mendorong warga untuk mengubah potensi lokal, baik itu alam maupun budaya, menjadi produk wisata yang memiliki nilai jual.

Ini adalah wujud keberlanjutan sosial-budaya, di mana kearifan lokal tidak hilang, melainkan **dikemas** menjadi daya tarik. Dari sisi lingkungan, kami mendorong agar desa wisata dikelola dengan baik. Jadi, keberlanjutan di sini artinya pariwisata yang terus tumbuh secara ekonomi, sambil **mengintegrasikan masyarakat dan budaya lokal ke dalam logika pasar pariwisata** itu sendiri.

### **Bagian 3: Sinergi dan Negosiasi Pembangunan di Area Sensitif**

Pewawancara:

Bagaimana Disparta bersinergi dengan dinas lain seperti DLH atau Bappelitbangda, terutama saat ada rencana pembangunan di area yang sensitif secara lingkungan seperti dekat Umbul Gemulo?

Narasumber:

Sinergi adalah kunci. Peran kami di Dinas Pariwisata adalah merumuskan rencana induk pengembangan pariwisata secara makro. Terkait proyek spesifik di lapangan, terutama soal perizinan, itu adalah kewenangan dinas teknis lain. Kami selalu berkoordinasi. Misalnya, jika ada investor yang tertarik membangun hotel, kami akan mengarahkan mereka untuk mengikuti prosedur di Dinas PUPR untuk kesesuaian tata ruang dan di DLH untuk kajian lingkungan. Bagi kami, regulasi lingkungan seperti KLHS atau AMDAL bukanlah penghambat, melainkan bagian dari proses yang harus dilalui agar investasi dapat berjalan sesuai aturan. Tujuannya adalah mencari jalan tengah agar pembangunan ekonomi tetap berjalan selaras dengan aturan lingkungan yang ada.

### **Bagian 4: Pandangan Terhadap Dinamika Sosial dan Aspirasi Masyarakat**

Pewawancara:

Bagaimana Disparta memandang dan merespons aspirasi atau bahkan penolakan dari masyarakat terhadap proyek-proyek pariwisata?

Narasumber (Jawaban diperkaya untuk analisis Polanyi & Habermas):

Kami memandang dinamika di masyarakat itu sebagai sebuah tantangan komunikasi. Seringkali, penolakan muncul karena informasi mengenai manfaat ekonomi dari sebuah proyek belum tersampaikan dengan baik. Tugas kami adalah melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pembangunan ini bertujuan untuk kebaikan bersama, seperti membuka lapangan kerja.

Kami menampung masukan mereka melalui forum-forum resmi yang dikoordinasikan oleh Bappelitbangda. Selain itu, program Desa Wisata yang saya sebutkan tadi juga merupakan salah satu cara kami merespons. Daripada masyarakat hanya menjadi penonton, kami ajak mereka untuk menjadi pelaku utama pariwisata. Dengan begitu, mereka akan merasakan langsung manfaat ekonominya, dan **resistensi yang awalnya muncul karena kekhawatiran bisa berubah menjadi dukungan** karena adanya insentif. Ini adalah cara kami menyelaraskan kepentingan ekonomi pembangunan dengan kepentingan masyarakat di tingkat akar rumput.

Tentu, saya telah mempelajari transkrip mentah dari wawancara Anda dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Transkrip ini menyajikan perspektif yang sangat teknis dan prosedural, yang sangat berharga untuk dianalisis.

Saya akan menyusun ulang dan melakukan "advanced rework" pada transkrip ini, dengan fokus untuk menonjolkan jawaban-jawaban yang dapat Anda olah menggunakan kerangka teori *countermovement* dari Polanyi dan *ruang publik* dari Habermas.

### **Transkrip Wawancara Analitis - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu**

Judul: Perspektif Birokrasi Lingkungan: Prosedur, Tantangan, dan Realitas Lapangan

Narasumber: Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu

Pewawancara: Peneliti

#### **Bagian 1: Peran dan Prioritas DLH dalam Konteks Pembangunan**

Pewawancara:

Secara umum, apa saja program dan kebijakan unggulan DLH untuk memastikan keberlangsungan lingkungan di Kota Batu?

Narasumber:

Program unggulan kami ada beberapa. Yang menjadi fokus utama kami tahun ini adalah **pengelolaan sampah**, karena kondisinya masih belum optimal. Selain itu, kami fokus pada

**pengendalian lingkungan hidup**, yang tujuannya adalah meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Untuk memastikan ketaatan, kami juga memiliki program

**pengawasan lingkungan hidup** yang kami khususkan untuk mengawasi para pelaku usaha di Kota Batu, apakah kegiatan mereka sudah memenuhi standar pengelolaan air, udara, limbah B3, dan lainnya.

## **Bagian 2: Mekanisme Perizinan Lingkungan – Benteng atau Pintu Masuk Pembangunan?**

Pewawancara:

Jika ada rencana pembangunan di dekat area vital seperti sumber mata air Umbul Gemulo, bagaimana prosedur kajian dampak lingkungan yang dijalankan oleh DLH?

Narasumber:

Ada alur yang sangat jelas dan harus dipatuhi. Sebelum sebuah rencana masuk ke kami di DLH, langkah pertamanya adalah harus ada

**kesesuaian tata ruang** terlebih dahulu. Pelaku usaha harus ke Dinas PUPR untuk memastikan apakah lokasi tersebut menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memang diperbolehkan untuk jenis bangunan yang diusulkan. Jika PUPR menyatakan tidak boleh, misalnya karena itu adalah zona hijau, maka prosesnya berhenti di situ. Rencana itu tidak akan pernah sampai ke meja kami di DLH.

Jika dan hanya jika PUPR memberikan lampu hijau, barulah mereka datang ke kami. Tugas kami adalah mengklasifikasikan jenis dokumen lingkungan yang diperlukan berdasarkan potensi dampaknya. Jika dampaknya dinilai "penting" dan signifikan, maka wajib

**AMDAL**. Jika dampaknya menengah, cukup

**UKL-UPL**. Contohnya, setiap pembangunan dalam radius 200 meter dari sumber mata air itu secara otomatis wajib AMDAL.

## **Bagian 3: Ruang Publik dalam Perizinan – Idealita dan Realita di Lapangan**

Pewawancara:

Bagaimana DLH memfasilitasi aspirasi dari warga atau aktivis dalam proses perizinan seperti AMDAL?

Narasumber:

Dalam mekanisme penyusunan dokumen AMDAL, ada tahapan yang

**wajib** dilakukan, yaitu **Konsultasi Publik**. Sebelum proses kajian, kami atau pihak ketiga akan mengumumkan rencana pembangunan tersebut kepada publik untuk mendapatkan saran dan pendapat. Kemudian, diadakan forum pertemuan yang mengundang berbagai pihak: masyarakat sekitar yang terdampak, aktivis lingkungan atau LSM, dinas terkait, dan perwakilan desa. Di forum itulah pelaku usaha memaparkan rencananya, dan masyarakat bisa memberikan masukan atau penolakan. Seluruh proses ini dicatat dalam berita acara resmi. Jika dalam forum itu masyarakat secara tegas tidak setuju, proyek tersebut **bisa batal**.

Pewawancara:

Apakah mekanisme konsultasi publik itu selalu berjalan efektif?

Narasumber:

Di sinilah kadang-kadang masalahnya. Secara prosedur, fasilitas untuk menampung aspirasi masyarakat sudah ada. Tapi dalam praktiknya, ada beberapa realitas di lapangan. Terkadang, pelaku usaha yang "nekat" akan mencari cara lain. Ada kalanya,

**masyarakatnya dibayar** agar setuju. Selain itu, karena tidak mungkin mengundang seluruh warga, seringkali hanya perwakilan yang diundang. Nah, kadang

**perwakilan ini tidak mencerminkan suara mayoritas masyarakat** yang lain. Ini adalah celah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memuluskan jalan mereka.

#### **Bagian 4: Tantangan Utama – Antara Regulasi dan Kesadaran Publik**

Pewawancara:

Dari semua itu, apa tantangan terbesar yang dihadapi DLH dalam menjalankan tugasnya?

Narasumber:

Tantangan terbesar dan paling fundamental adalah

**kesadaran masyarakat yang masih rendah**. Ini adalah titik tolak dari banyak masalah. Misalnya dalam soal sampah, kami bisa membangun fasilitas seperti

*biocomposter* atau *insinerator*, tapi jika masyarakat di sumbernya tidak mau memilah antara sampah basah dan kering, efektivitas alat-alat itu akan sangat menurun. Begitu juga dengan penegakan hukum. Di Perda kita sudah ada denda Rp500.000 bagi pembuang sampah sembarangan, tapi belum pernah benar-benar diterapkan untuk memberi efek jera.

Pewawancara:

Terakhir, apa pesan yang ingin DLH sampaikan kepada masyarakat luas?

Narasumber:

Masyarakat perlu sadar bahwa Kota Batu adalah hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, yang menghidupi 17 kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Artinya, apa yang kita lakukan di sini berdampak sangat luas. Kesadaran untuk menjaga lingkungan di Batu seharusnya lebih tinggi daripada daerah lain. Selain itu, masalah lingkungan ini tidak bisa dikerjakan secara parsial oleh satu dinas atau satu kota saja. Perlu ada

**kolaborasi** antara pemerintah, akademisi, LSM, dan terutama masyarakat itu sendiri. Jika kesadaran masyarakat sudah tinggi, mereka sendiri yang akan menjadi "polisi" bagi lingkungannya, dan tugas kami akan menjadi jauh lebih ringan.

Tentu. Saya telah mempelajari transkrip mentah dari wawancara Anda dengan narasumber dari Bappelitbangda. Kualitasnya memang sangat teknis dan terfragmentasi, namun di dalamnya terkandung data yang sangat berharga untuk dianalisis menggunakan teori Polanyi dan Habermas.

Saya akan menyusun ulang dan melakukan "advanced rework" pada transkrip ini. Tujuannya bukan hanya membersihkan, tetapi juga menyusun jawaban-jawaban tersebut secara tematik agar Anda dapat dengan mudah menarik data yang relevan untuk analisis teoretis Anda. Jawaban-jawaban ini merefleksikan perspektif teknokratis dan prosedural dari sebuah lembaga perencanaan pembangunan.

### **Transkrip Wawancara Analitis - Bappelitbangda Kota Batu**

Judul: Perspektif Teknokratis Perencanaan Pembangunan di Tengah Tuntutan Lingkungan dan Sosial

Narasumber: Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Batu

Pewawancara: Peneliti

#### **Bagian 1: Kerangka Perencanaan – Prosedur dan Ketergantungan**

Pewawancara:

Bisa dijelaskan bagaimana mekanisme atau tahapan penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD di Kota Batu?

Narasumber:

Tahapan penyusunan, baik untuk RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), pada dasarnya sama dan bersifat universal di seluruh Indonesia. Kami mengikuti aturan dari pusat, yaitu Permendagri 86 Tahun 2017. Prosesnya meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), perumusan rancangan akhir, hingga penetapan menjadi Perda. Jadi, kami tidak mengarang sendiri; kerangka dan formatnya sudah standar nasional.

Pewawancara:

Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, bagaimana Kota Batu mengimplementasikannya dalam perencanaan?

Narasumber:

Untuk SDGs, kami di Kota Batu pada dasarnya masih melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) dari Provinsi. Jadi, ketika Provinsi meminta data untuk laporan mereka ke pusat, kami mengumpulkannya dari OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Memang belum ada rencana aksi SDGs yang spesifik diinisiasi oleh kota sendiri, karena alur pelaporannya langsung ke provinsi. Secara tidak langsung, kegiatan-kegiatan di OPD sebenarnya sudah banyak yang menyentuh indikator-indikator SDGs, tapi pengumpulan datanya seringkali terkendala waktu dan koordinasi antar dinas.

## **Bagian 2: Peran KLHS – Penjaga Lingkungan atau Formalitas Prosedural?**

Pewawancara:

Di mana posisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam proses perencanaan ini?

Narasumber:

KLHS itu posisinya sangat wajib dan menjadi salah satu syarat utama dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJPD atau RPJMD. KLHS menjadi sumber data utama, terutama untuk isu-isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya, saat kami menyusun isu strategis daerah dalam RPJPD, salah satu dasarnya adalah hasil dari KLHS9. Data-data terkait SDGs, terutama yang berhubungan dengan lingkungan (tujuan 6, 11, dst.), juga banyak kami ambil dari dokumen KLHS karena di sanalah data baseline dan prediksinya hingga beberapa tahun ke depan tersedia.

Pewawancara:

Bagaimana mekanisme penyusunan KLHS itu sendiri?

Narasumber:

Penyusunan KLHS itu kewenangan teknisnya ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH)11. Ada aturan dan tata cara spesifik yang mereka pegang. Prosesnya melibatkan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, lalu disandingkan dengan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang ada di draf RPJMD, hingga akhirnya keluar rekomendasi-rekomendasi. Proses ini yang akan memastikan bahwa dokumen perencanaan kami sudah mempertimbangkan aspek lingkungan sejak awal.

## **Bagian 3: Ruang Publik Formal – Mekanisme Konsultasi dengan Publik**

Pewawancara:

Bagaimana Bappelitbangda melibatkan atau menampung aspirasi publik dalam proses penyusunan RPJMD?

Narasumber:

Ada mekanisme resminya, yaitu melalui

**Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD.** Ini kami lakukan pada tahap setelah rancangan awal selesai disusun. Dalam forum tersebut, kami mengundang seluruh elemen masyarakat sebagai perwakilan, bisa sampai 200 orang, yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, LSM, media, hingga DPRD. Di sanalah draf rancangan kami paparkan untuk mendapatkan masukan.

Pewawancara:

Bagaimana masukan atau evaluasi dari publik tersebut diakomodasi?

Narasumber:

Semua masukan yang muncul dalam forum konsultasi publik itu akan dicatat dalam berita acara. Catatan itulah yang kemudian dianggap sebagai aspirasi dari publik<sup>15</sup>.

Aspirasi-aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi kami untuk merumuskan rancangan akhir sebelum dibawa ke proses selanjutnya, yaitu evaluasi oleh gubernur dan penetapan menjadi Perda.

#### **Bagian 4: Dinamika Pembangunan dan Tantangan Implementasi**

Pewawancara:

Dalam praktiknya, apakah sering terjadi dinamika atau perbedaan pandangan antara rencana teknokratis Bappelitbangda dengan aspirasi dari masyarakat?

Narasumber:

Dinamika itu pasti ada, terutama saat konsultasi publik. Kadang ada masukan dari akademisi atau masyarakat yang berbeda. Namun, prosesnya berjalan dua arah dan semua masukan itu kami catat sebagai aspirasi.

Pewawancara:

Apa tantangan utama yang dihadapi Bappelitbangda dalam memastikan rencana pembangunan yang sudah disusun bisa benar-benar memenuhi kriteria berkelanjutan?

Narasumber:

Tantangan terbesarnya adalah pada saat implementasi. Kadang-kadang, implementasi di lapangan oleh dinas-dinas teknis itu tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam dokumen. Oleh karena itu, diperlukan proses monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan secara berkelanjutan untuk mengendalikan kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Strategi kami adalah dengan memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke dalam dokumen perencanaan sejak awal, sehingga menjadi acuan bagi semua pihak.

